

**PENGARUH PERAN AUDITOR INTERNAL DAN PELAKSANAAN FUNGSI
MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KINERJA KEUANGAN
UNIVERSITAS RIAU**

Mariadi¹⁾

Amir Hasan²⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Riau

²⁾ Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Riau

Abstract: The Influence Of The Role Of Internal Auditors And The Implementation Of Financial Management Functions In The Management Of Non-Tax Revenue To The Financial Performance Of The University Of Riau. Financial performance is the level of achievement of results of an activity within a government / non-government agency in relation to the use of funds in accordance with quantity and quality measured using the principles of efficiency and effectiveness. Universities as one unit of government work units that provide services to the community have characteristics and properties different from the work unit of government in general At the University of Riau the implementation of financial management functions have long been implemented in the implementation has not been running as it should. According to the evaluation result of Riau University governance system in the book of Strategic Plan 2014, Financial management has not fulfilled the principles of transparency and accountability caused by still constrained by the current financial management system. The formulation of the problem in this research is whether there is influence simultaneously the role of internal auditor and the function of financial management in the management of non-tax revenue to the performance of Finance University of Riau. This research uses quantitative descriptive method. The nature of this research is descriptive explanatory research with 63 respondents.

The results showed that there is a significant influence between the role of internal auditors on the financial performance of the University of Riau and also there is a significant influence between the variable implementation of financial management functions to variable financial performance of the University of Riau. Simultaneously the role of internal auditors and the implementation of financial management functions affect the financial performance of the University of Riau in managing Non-Tax State Revenue Management, with a very significant level of influence. Where from the determination koefisien R2 known that the discipline and supervision variables have an influence of 77.4% and the remaining 22.6% influenced by variables not examined in this study.

Keywords: Role of Internal Auditor, Implementation of Financial Management Function and Financial Performance

PENDAHULUAN

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan pengelolaan keuangan negara secara umum adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat tiga paradigma baru mengenai pengelolaan keuangan negara yakni *pertama*, konsepsi kerangka penganggaran jangka menengah, *kedua* konsepsi anggaran berdasarkan kinerja yang lebih menekankan kepada pencapaian keluaran yang akan menunjang pencapaian atas hasil yang telah ditetapkan dari suatu unit organisasi, dan *ketiga* konsepsi anggaran terpadu yang menekankan pada optimalisasi penggunaan dana guna mencapai sasaran program yang akan dilaksanakan oleh suatu unit organisasi.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas,

efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Otonomi perguruan tinggi yaitu adanya pemberian kewenangan secara luas kepada perguruan tinggi untuk mengatur organisasi dan rumah tangganya sendiri dengan badan hukum yang bersifat nirlaba. Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Pasal 27 adalah dewan penyantun, unsur pimpinan, unsur tenaga pengajar, senat perguruan tinggi, unsur pelaksana akademik (bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat), unsur pelaksana administratif, dan unsur penunjang (perpustakaan, laboratorium, bengkel, pusat komputer, kebun percobaan, dan lain-lain yang dianggap perlu).

Pendidikan tinggi memerlukan otonomi bukan hanya otonomi dalam bentuk kebebasan akademik, tetapi juga otonomi kelembagaan dalam masalah-masalah manajemen, penyusunan program, dan anggaran. Dengan demikian, pendidikan tinggi tersebut sebagai lembaga akan bersifat kreatif dan menjadi pelopor perubahan baik di dalam masyarakat sekitarnya maupun di dalam kemajuan ilmu pengetahuan.

Dengan adanya otonomi lembaga pendidikan tinggi, maka dapat dipilah-

pilah prinsip-prinsip mana yang dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan tinggi yang ada. Mengubah suatu manajemen pendidikan tinggi tidaklah semudah sebagaimana yang digambarkan. Terdapat banyak kendala yang dihadapi di dalam penerapan suatu sistem. Selain itu, setiap perubahan sistem biasanya menuntut biaya dan persiapan yang matang, apalagi jika tidak tersedia sumber daya manusia yang diperlukan, maka setiap penerapan prinsip manajemen baru akan meminta biaya besar.

Untuk melakukan berbagai perubahan, perguruan tinggi memang mengalami kendala yang boleh dikatakan luar biasa sulitnya. Hal ini terutama disebabkan sistem yang sudah sedemikian terbangun, belum lagi mentalis para pemimpin dan seniornya yang cukup feodal dan sulit untuk menerima suatu perubahan. Ini terjadi karena sekian lama perguruan tinggi dibangun dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, yang segala-galanya harus ditentukan oleh pusat.

Universitas Riau (UR) merupakan lembaga perguruan tinggi yang memiliki otonomi berdiri pada tanggal 01 Oktober 1962. dengan Surat Keputusan Yayasan Universitas Riau No. 02/KPTS/JUR/62 tanggal 25 September 1962, diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123.

Adapun Visi Universitas Riau adalah “Menjadi Universitas Riset Yang Cemerlang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Kawasan Perairan dan Budaya Melayu di Indonesia pada tahun 2035”.

Sementara itu Misi Universitas Riau adalah

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi berbasis kawasan perairan dan budaya melayu.
- 2) Menyelenggarakan penelitian bermutu untuk menyelesaikan masalah daerah dan nasional berbasis kawasan perairan dan budaya melayu.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi Universitas Riau dalam pembangunan daerah dan nasional berbasis kawasan perairan dan budaya melayu.

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Pebendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Di samping itu, DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawaspengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Darwanis (2015) mengatakan kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah lembaga pemerintah/non pemerintah sehubungan dengan penggunaan dana sesuai dengan kuantitas dan kualitas terukur dengan menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas dimana kinerja keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya peran auditor internal dalam pelaksanaan anggaran dan berjalannya fungsi manajemen keuangan dalam organisasi tersebut.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi institusi. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja institusi adalah aspek keuangan berupa anggaran berbasis kinerja. Untuk melakukan sesuatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) menghasilkan, diperlukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Ketentuan tentang pengelolaan Keuangan Negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Aturan-aturan tersebut meliputi: Pasal 3 ayat (1).

menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pertanggungjawaban Keuangan Departemen/Lembaga adalah Laporan Keuangan Departemen/Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang disusun secara berjenjang mulai dari Satker. Pertanggungjawaban Keuangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang mempertegas tanggung jawab manajerial pengelola fiskal dan pengguna anggaran/barang untuk menyelenggarakan akuntansi dan mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Laporan Keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan Laporan Kementerian Negara/Lembaga Serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan Negara untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dengan keluarnya Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan sampai pemeriksaan, telah mempunyai aturan yang jelas

Perguruan tinggi sebagai salah satu unit satuan kerja pemerintah yang memberi pelayanan kepada masyarakat

mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda dengan satuan kerja pemerintah pada umumnya. Kemudian karakteristik penerimaan yang dilakukan sebagai satuan kerja juga mempunyai karakteristik yang berbeda. Sebagai satuan kerja, perguruan tinggi menerima berjenis-jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan jadwal penerimaan tertentu dan jumlahnya kadang-kadang tidak dapat diperkirakan.

Pada Universitas Riau pelaksanaan fungsi manajemen keuangan sudah lama diterapkan dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Menurut hasil evaluasi sistem tata kelola Universitas Riau dalam buku Rencana Strategi (2014), Manajemen keuangan belum memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disebabkan karena masih terkendala dengan sistem manajemen keuangan yang berlaku saat ini. Perencanaan dan pengelolaan keuangan masih tergantung pada dana yang tersedia dan belum berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi sistem tata kelola tersebut untuk melakukan pembenahannya diperlukan peran dari auditor internal untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan PNBP. Auditor internal memberikan jasa untuk meningkatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Kontribusi auditor internal menjadi semakin penting seiring dengan makin berkembang dan makin kompleksnya sistem pemerintahan.

Auditor internal ialah orang atau badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing, oleh sebab itu Auditor internal senantiasa berusaha untuk

menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Dengan demikian auditor internal muncul sebagai suatu kegiatan khusus dari bidang akuntansi yang luas yang memanfaatkan metode dan teknik dasar dari penilaian.

Sebagai gambaran, berikut ini dapat ditampilkan jumlah pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada di Universitas Riau sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Riau Tahun 2012 s/d 2016

No	Tahun	Jumlah Pendapatan
1	2012	Rp. 167.994.069.000,-
2	2013	Rp. 184.564.197.000,-
3	2014	Rp. 182.602.909.000,-
4	2015	Rp. 214.775.739.000,-
5	2016	Rp. 237.615.011.000,-

Sumber: Subag Aklap UR Tahun 2017

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional disebutkan bahwa peran seorang auditor internal adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program pengawasan
- 2) Pengawasan kebijakan dan program
- 3) Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik Negara.
- 4) Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan

- 5) Pendampingan dan reuiu laporan keuangan
- 6) Pemberian saran dan rekomendasi
- 7) Penyusunan laporan hasil pengawasan
- 8) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan

Di Universitas Riau pembentukan Satuan Pegawai Internal (SPI) yang disebut dengan auditor internal sudah berjalan sejak tahun 2002 namun pelaksanaannya belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan, dan masih membutuhkan sosialisasi tentang pentingnya peran auditor internal untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Peran auditor internal dalam pengelolaan keuangan bertujuan untuk membantu manajemen dalam menjalankan fungsinya sehingga kinerja manajerial dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Dari observasi awal peneliti adapun fenomena masalah terkait peran auditor internal dan pelaksanaan fungsi manajemen keuangan dalam pengelolaan pendapatan negara bukan pajak terhadap kinerja keuangan di Universitas Riau diantaranya:

- 1) Kurangnya pengawasan auditor internal terhadap piutang yang dimiliki oleh Universitas Riau dimana banyak transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Universitas Riau dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan instansi pihak ketiga (Pemerintah Daerah dan Swasta), hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut MOU antara Universitas Riau dengan instansi pihak ketiga tersebut tidak melibatkan auditor internal sehingga berdampak kepada transparansi pengelolaan keuangan.
- 2) Kurangnya koordinasi tenaga auditor keuangan dilingkungan Universitas

Riau dalam hal pengelolaan aset-aset milik Universitas Riau sehingga berdampak kepada hilangnya aset-aset Universitas Riau berupa tanah, bangunan dan alat kerja lainnya pada saat perpindahan pengelolaan Universitas Riau dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Kementerian Riset dan Teknologi.

- 3) Masih adanya tenaga auditor keuangan dilingkungan Universitas Riau tidak menjalankan tugas dan fungsi seorang tenaga auditor internal dengan baik sehingga berdampak kepada pelaksanaan fungsi manajemen keuangan dalam pengelolaan pendapatan negara bukan pajak terhadap kinerja keuangan di Universitas Riau.
- 4) Kurang tegasnya tenaga auditor internal dilingkungan Universitas Riau dalam melakukan pengawasan pada unit-unit pengelola keuangan pada saat melakukan transaksi keuangan baik itu dari segi penganggaran sampai kepada kelengkapan dokumen anggaran sehingga pada saat Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan masih ditemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh organisasi Universitas Riau dalam pengelolaan keuangannya.

Sementara itu mengenai fenomena masalah terkait kinerja keuangan di Universitas Riau diketahui sebagai berikut:

- 1) Belum tertibnya administrasi keuangan yang ada di Universitas Riau terutama menyangkut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena selama ini pemasukannya masih berasal dari SPP Mahasiswa sedangkan untuk bidang usaha yang dimiliki oleh Universitas

Riau seperti usaha kantin, foto copy dan sewa ruangan sampai saat ini masih banyak yang belum menyeter.

- 2) Masih ditemukannya transaksi keuangan yang masuk ke rekening Universitas Riau yang tidak diketahui siapa pemiliknya, dimana dosen melakukan kerjasama atas nama Universitas Riau dengan instansi pihak ketiga (Pemerintah Daerah dan Swasta), dalam rangka pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tapi terlambat melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak Universitas Riau sehingga berdampak kepada kurang baiknya laporan keuangan dari Universitas Riau.
- 3) Terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan setiap bulannya yang dilaksanakan oleh Universitas Riau kepada stakeholders yang berkepentingan terhadap laporan kinerja keuangan Universitas Riau terutama kepada Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Kantor KPPN Riau sehingga hal ini dipandang tidak sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Masih sering terjadinya revisi anggaran terutama terkait dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Universitas Riau terutama menyangkut perencanaan kegiatan yang disusun pada akhir tahun anggaran sehingga DIPA anggaran yang seharusnya dapat dilaksanakan kegiatannya diawal tahun menjadi tertunda.

Dengan adanya fenomena masalah dalam penelitian ini maka seharusnya auditor internal dalam bekerja harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.

Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya; atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang dapat, atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal. Auditor Internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia; untuk mendapatkan keuntungan pribadi, secara melanggar

hukum, atau yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.

Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview, atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Audit internal sebagai perantara untuk meningkatkan keefektifitasan dan keefesienan suatu organisasi dengan menyediakan wawasan dan rekomendasi berdasarkan analisis dan dugaan yang bersumber dari data dan proses usaha. Para auditor internal dikenal sebagai karyawan yang dibentuk untuk melakukan audit internal. Hasil audit laporan keuangan harus memiliki manfaat baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Selain itu, laporan audit juga memiliki keterbatasan tertentu dan beberapa penyimpangan dari standar laporan audit dan auditor harus mengetahui semuanya.

Pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang dilaksanakan oleh auditor internal diatas dimaksudkan agar dalam pengelolaan keuangan dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan PNBPF fungsi manajemen meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pengawasan. Dalam memenuhi standar ini, seorang auditor yang berpengalaman harus secara kritis melakukan *review* atas pekerjaan

yang dikerjakan dan pertimbangan yang digunakan oleh personil kurang berpengalaman yang turut mengambil bagian dalam audit. Standar penggunaan kemahiran ini mengharuskan seorang auditor berlaku jujur dan tidak cerobah dalam melakukan audit.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah penelitian social bersifat deskriptif kuantitatif, Sifat penelitian adalah deskriptif *explanatory research* yaitu untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2006:67).

Arikunto (2002;177) bahwa “Bila populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semua sebagai sampel penelitian, sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan PNBPF pada Bagian Keuangan KPA Universitas Riau yang berjumlah 63 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan mengenai hasil penelitian dimana berdasarkan hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel Peran Auditor Internal Dan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Universitas Riau. Hasil penelitian dapat dibuktikan berdasarkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa Peran Auditor Internal (X_1) dan

Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan (X_2) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Universitas Riau. Dalam hal ini Kinerja Keuangan Universitas Riau telah berhasil ditingkatkan dengan melakukan pendekatan terhadap Peran Auditor Internal (X_1) dan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan (X_2). Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa Peran Auditor Internal (X_1) dan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan (X_2) memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Kinerja Keuangan (Y) Universitas Riau. Variabel Peran Auditor Internal (X_1) dan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan (X_2) mempunyai koefisien regresi positif yang membuktikan kontribusinya terhadap Kinerja Keuangan (Y) Universitas Riau.

Semakin meningkat peran dari auditor internal melaksanakan fungsi dan tugasnya dan berjalan dengan baiknya pelaksanaan fungsi manajemen keuangan maka akan semakin baik pula kinerja keuangan Universitas Riau dalam hal melakukan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 2 Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Adjusted Std. Error of the</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>R Square</i>	<i>Estimate</i>
1	.828 ^a	.786	.774	3.18190

a. Predictors: (Constant), Peran Auditor Internal dan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 Data Diolah)

Nilai koefisien determinasi (R^2) dipergunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas Peran Auditor Internal (X_1) dan Pelaksanaan Fungsi

Manajemen Keuangan (X_2) terhadap kinerja keuangan (Y) Universitas Riau. Berdasarkan hasil uji determinasi hipotesis data diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.786. Hal ini menunjukkan bahwa 77,4% variabel Peran Auditor Internal (X_1) dan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan (X_2) menjelaskan terhadap variabel kinerja keuangan (Y) Universitas Riau dalam hal melakukan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sedangkan 22,6% adalah merupakan pengaruh Variabel lain seperti variabel insentif, kepemimpinan, motivasi kerja, lingkungan kerja ataupun budaya organisasi. Nilai R^2 yang besar dapat diartikan bahwa kemampuan variabel bebas (*independent variable*) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (*dependent variable*) tidak terbatas. Menurut Ghazali (2005:79) menyatakan bahwa secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan.

Secara serempak diperoleh bahwa nilai F_{hitung} (53.948) lebih besar dibandingkan dengan nilai F_{tabel} (3.119), dan *sig. á* (0.000^a) lebih kecil dari alpha 5% (0.05). dengan kata lain Peran Auditor Internal (X_1) dan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan (X_2) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Y) Universitas Riau. Hasil pengujian hipotesis data secara parsial diketahui Nilai t_{hitung} untuk variabel peran auditor internal (2,098) lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} (1,992), atau nilai *sig. t* untuk variabel peran auditor internal (0.000) lebih kecil dari alpha (0.025) sementara itu Nilai t_{hitung} untuk variabel Pelaksanaan Fungsi

Manajemen Keuangan (8.997) lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} (1.992), atau nilai sig. t untuk variabel Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan (0.000) lebih kecil dari alpha (0.025). Oleh karena itu secara parsial variabel Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan (X_2) berpengaruh lebih dominan daripada variabel Peran Auditor Internal (X_1). Maksudnya adalah, variabel Fungsi Manajemen Keuangan (X_2) lebih menentukan terhadap kinerja keuangan (Y) Universitas Riau dalam hal melakukan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun hal ini bukan berarti bahwa variabel Peran Auditor Internal (X_1) tidak menentukan terhadap Kinerja Keuangan (Y) Universitas Riau dalam hal melakukan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, akan tetapi pengaruh variabel Peran Auditor Internal (X_1) terhadap Kinerja Keuangan (Y) Universitas Riau dalam hal melakukan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak sebesar pengaruh variabel Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan (X_2) terhadap kinerja keuangan (Y) Universitas Riau dalam hal melakukan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif penjelasan variabel peran auditor internal menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang berasal dari seluruh pengelola keuangan PNBPN pada Bagian Keuangan KPA Universitas Riau yang berjumlah 63 orang menjawab setuju dengan rata-rata 44 orang (70%), responden yang menjawab sangat setuju dengan rata-rata 7 orang (11%) dari 63 orang responden, hal ini menunjukkan bahwa pengelola keuangan PNBPN pada Bagian Keuangan KPA Universitas Riau

telah menjalankan perannya sebagai internal auditor di kampus Universitas Riau dan sudah masuk dalam kategori baik dengan total skor sebesar 2.417. Responden yang menjawab ragu-ragu dengan rata-rata 8 orang (12%). Responden yang menjawab tidak setuju rata-rata 4 orang (6%) dan responden yang menjawab sangat tidak setuju rata-rata 1 orang (2%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pengelola keuangan PNBPN pada Bagian Keuangan KPA Universitas Riau yang menjadi auditor internal merasa perannya sudah cukup baik. Karena selama ini masih ditemukannya kelemahan-kelemahan di dalam pengelolaan PNBPN di Kampus Universitas Riau.

Auditor Internal yang ada di Universitas Riau harus mampu menunjukkan perannya sebagai pengelola keuangan yang baik dengan cara menunjukkan sikap kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya. Auditor Internal yang ada di Universitas Riau harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Auditor Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif penjelasan variabel Pelaksanaan fungsi manajemen keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang berasal dari seluruh pengelola keuangan PNBPN pada Bagian Keuangan KPA

Universitas Riau yang berjumlah 63 orang menjawab sangat setuju dengan rata-rata 50 orang (79%), responden yang menjawab setuju dengan rata-rata 11 orang (17%) dari 63 orang responden, hal ini menunjukkan bahwa pengelola keuangan PNBPN pada Bagian Keuangan KPA Universitas Riau telah menjalankan pelaksanaan fungsi manajemen keuangan di kampus Universitas Riau dan sudah masuk dalam kategori sangat baik dengan total skor sebesar 3.560. Responden yang menjawab ragu-ragu dengan rata-rata 2 orang (3%). Responden yang menjawab tidak setuju rata-rata 1 orang (2%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pengelola keuangan PNBPN pada Bagian Keuangan KPA Universitas Riau yang menjadi auditor internal menjalankan pelaksanaan fungsi manajemen keuangan di kampus Universitas Riau hal ini mungkin saja bisa terjadi disebabkan oleh beberapa indikator diantaranya kepemimpinan, lingkungan organisasi atau pemberian insentif kepada pegawai yang belum memuaskan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herminingsih (2009), menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan. Dengan terlaksananya fungsi manajemen keuangan dalam pengelolaan PNBPN mendorong para pengelola keuangan di Universitas Malikussaleh untuk lebih berpartisipasi dalam pencapaian kinerja lembaga Universitas Malikussaleh yang lebih baik dan melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif penjelasan variabel kinerja keuangan pada Universitas Riau menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang berasal dari seluruh pengelola keuangan PNBPN pada Bagian Keuangan KPA Universitas Riau yang berjumlah 63 orang menjawab sangat setuju dengan rata-rata 53 orang (84%), responden yang menjawab setuju dengan rata-rata 5 orang (9%) dari 63 orang responden, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Universitas Riau telah berjalan sesuai harapan semua pihak dan masuk kedalam kategori sangat baik dengan total skor sebesar 3.605. Responden yang menjawab ragu-ragu dengan rata-rata 3 orang (5%). Responden yang menjawab tidak setuju rata-rata 2 orang (3%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pengelola keuangan PNBPN pada Bagian Keuangan KPA Universitas Riau yang menjadi auditor internal menyatakan bahwa kinerja keuangan yang ada di Universitas Riau sudah berjalan sesuai harapan karena dari beberapa kasus yang mereka alami seperti yang sudah disampaikan pada fenomena masalah dalam penelitian ini, dan hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi berjalan dengan baiknya kinerja keuangan pada Universitas Riau.

Efektivitas dan efisiensi dari Universitas Riau dalam menjalankan kegiatannya ditentukan oleh kemampuan dalam memperoleh profitabilitas dan aktivitas dalam organisasi. Dengan demikian penggunaan analisis rasio keuangan dapat menggambarkan kinerja keuangan yang telah dicapai. Untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan usaha maka Universitas Riau perlu

menganalisis laporan keuangan agar dapat diperoleh informasi tentang posisi keuangan yang bersangkutan sehingga dapat mengetahui sejauh mana kinerja keuangan dari organisasi. Dalam hal ini peran auditor dan pelaksanaan fungsi manajemen dalam pengelolaan PNBPN sangat menentukan sekali baik atau tidaknya kinerja keuangan dari Universitas Riau. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dari Universitas Riau dapat tercapai dan mengetahui sejauh mana efektifitas dari kinerja keuangan dalam mencapai tujuan maka secara periodik perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan.

Pada hasil penelitian ini dapat dilihat variabel yang memiliki nilai signifikan terhadap kinerja keuangan pada Universitas Riau adalah variabel pelaksanaan fungsi manajemen keuangan (X2) dengan nilai t-hitung (8,997), hal ini menandakan kinerja keuangan yang baik pasti telah melaksanakan fungsi manajemen keuangan dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kegiatan audit internal merupakan suatu kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan memajukan kegiatan suatu organisasi dengan membantu organisasi tersebut mencapai tujuannya. Hal ini menunjukkan peran audit internal sangat berkaitan dengan tujuan atau kinerja. Peran auditor internal di Universitas Riau dalam kegiatan *assurance* dan konsultasi dapat memajukan kinerja lembaga dalam mencapai tujuannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Susanto (2015) dimana peranan audit internal yang terdiri dari berbagai faktor yaitu tujuan audit,

kopetensi audit internal, program kerja audit, dan pelaksanaan audit internal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sehingga manfaat peran audit internal menjadi lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara peran auditor internal terhadap Kinerja kinerja keuangan dari Universitas Riau dalam mengelola Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa para auditor internal yang ada di Universitas Riau telah melakukan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin untuk itu peneliti menyarankan kepada Universitas Riau dalam rangka meningkatkan kualitas dari auditor internal maka perlu setiap auditor internal yang ada di Universitas Riau senantiasa dibekali dengan kemampuan yang baik dan pengetahuan yang cukup melalui pendidikan dan pelatihan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya agar mereka dalam bekerja dapat dengan baik memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.

Selanjutnya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pelaksanaan fungsi manajemen keuangan terhadap Kinerja kinerja keuangan dari Universitas Riau dalam mengelola Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran pelaksanaan fungsi manajemen keuangan dalam mengelola Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Universitas Riau

sudah berjalan dengan baik. Untuk itu penulis menyerankan variabel pelaksanaan fungsi manajemen keuangan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap Kinerja keuangan dari Universitas Riau dalam mengelola Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak namun hal ini tetap saja perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pihak manajemen dari Universitas Riau.

Secara serempak peran auditor internal dan pelaksanaan fungsi manajemen keuangan berpengaruh terhadap terhadap Kinerja keuangan dari Universitas Riau dalam mengelola Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan tingkat pengaruh yang sangat signifikan. Dimana dari uji determinasi R^2 diketahui bahwa variabel disiplin dan pengawasan memiliki pengaruh sebesar 77,4% dan sisanya sebesar 22,6% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti seperti variabel insentif, kepemimpinan, motivasi kerja, lingkungan kerja ataupun budaya organisasi. Oleh karena itu Rektor Universitas Riau harus mampu memperhatikan kesejahteraan dan jenjang karir dari auditor internal yang ada saat ini karena dengan tugas peranan mereka yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi maka selayaknyalah pihak manajemen memperhatikan tingkat kesejahteraan mereka, karena tanpa keberadaan auditor internal maka perbaikan sistem keuangan yang ada di Universitas Riau sulit untuk dicapai karena sistem tersebut akan berjalan apa adanya tanpa adanya upaya untuk melakukan evaluasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Arens, A. A. and J.K. Loebbecke, 2014. *Auditing: Pendekatan Terpadu. Buku Satu, Cetakan Lima*, Terjemahan: Amir Jusuf Abadi, Jakarta : Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, Indra, 2015, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta Erlangga.
- BPKP, 2016, *Audit Berpeduli Resik.*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan.
- Daniel, Susanto, 2007, *Peran Audit Internal terhadap Kinerja Perusahaan* (Studi Pada PT. Oto Parmaceutical Industries.Ltd.
- Darwanis, Arsyati, Djalil, 2015, *Universitas Syiah Kuala, Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNBPN Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Instansi Pada Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 1, No. 1 Januari 2015, Hal. 29-49
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2005, Peraturan Nomor: 02/PB/2005, *Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Pendapatan Dan Belanja Negara*, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Effendi, 2016, *Kendala dalam Penerapan Ketentuan dalam PNBPN dan Penetapan Aset Tetap Universitas Gajah Mada*. sofian. staff. ugm.ac.i/--- /kendala-dalam-penerapan-PNBPN.pdf
- Fannani, Zaenal., Hanif, A. R., dan

- Subroto, B.2016. *Pengaruh Struktur Audit, Konflik Peran, dan Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Auditor*, edisi kelima. Bandung. Alfabeta
- Gomes, Faustina Cardoso, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Andi.
- Indriantoro, 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Ketiga, BPFE Yogyakarta.
- Jumingan. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- LAN RI, 2015, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Dan Kinerja Manajerial Pemerintah*, Jakarta.
- Ngurah, Arya, 2012. *Internal Auditing*, *Buku Satu*, Penerbit Ananda, Yogyakarta,
- Rahmawaty, 2013, *Pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap kinerja manajemen pada BUMN dan BUMD di Kota Banda Aceh*.
- Rivai, Veithzal, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Edisi Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2014. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Edisi Ketiga, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Simanjuntak, Payaman, J, 2014, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta
- Sukmadinata, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan*, Edisi Ketiga. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Tugiman, Hiro. 2010, “*Pandangan Baru Internal Audit*”, adisi empat, Yogyakarta: kanisius.
- Yamin,S. 2015. *Structural Equation Modeling: Belajar Lebih Mudah Teknik Analisis Data Kuesioner dengan LISREL-PLS*, Edisi Revisi. Buku Seri Kedua. Salemba Infotek. Jakarta